



Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik

Naura Yusro Fathurochman¹, Ririn Puspita Tutiasri²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 19043010007@student.upnjatim.ac.id, ririn_puspita.ilkom@upnjatim.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02	<p>This research reveals Generation Z's acceptance of the issue of political polarization in digital media. Political polarization often leads to divisions and conflicts in society, such as in the 2017 and 2019 election contestations. One of its manifestations is in the politics of labeling and segregation which can still be found today. Political polarization is closely related to past competition and will continue to influence future competition so that it becomes a concern about its potential ahead of the 2024 Election. Generation Z as young voters in the upcoming 2024 election occupies a very large number and their active use of digital media is very high. This research is aimed at finding out how Generation Z's acceptance of political polarization is contained in the show "Polarization in 2024" on Anies Baswedan's YouTube channel. The study technique in this study used Stuart Hall's media audience analysis (Reception Studies). The reception analysis research method focuses on the role of the audience in constructing the meaning of the messages they receive through the media. The data collection method in this study involved the use of interviews through Focus Group Discussion (FGD) with 14 informants. The research findings show that informants take various positions as audiences in their experiences. In the dominant position of their readers, they consider that political polarization that occurs is a natural thing to be experienced by democratic countries and is not something to be afraid of. It was continued by informants in the position of negotiated readers who thought that political polarization was something that could happen but had to stop at the meaning of differences of opinion and under supervision not to turn into conflict and division.</p>
Keywords: <i>Generation Z;</i> <i>2024 Election;</i> <i>Political Polarization;</i> <i>Digital Media.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02	<p>Penelitian ini mengungkapkan penerimaan generasi Z terhadap isu polarisasi politik dalam media digital. Polarisasi politik kerap berujung pada perpecahan dan konflik dalam masyarakat seperti pada kontestasi pemilu 2017 dan 2019 silam. Salah satu manifestasinya terdapat dalam politik pelabelan dan segregasi yang masih bisa ditemui hingga detik ini. Polarisasi politik bersifat erat berhubungan dengan persaingan masa lalu serta akan terus berpengaruh pada persaingan masa depan sehingga menjadi sebuah kekhawatiran akan potensinya menjelang Pemilu 2024. Generasi Z sebagai pemilih muda pada pemilu 2024 mendatang menempati jumlah yang sangat besar serta keaktifannya dalam menggunakan media digital sangatlah tinggi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerimaan Generasi Z terhadap polarisasi politik yang terdapat pada tayangan "Polarisasi di 2024" pada channel youtube Anies Baswedan. Teknik pengkajian dalam penelitian ini menggunakan kajian analisis khalayak media (<i>Reception Studies</i>) Stuart Hall. Metode penelitian analisis penerimaan berfokus pada peran audiens dalam membangun makna dari pesan yang mereka terima melalui media. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan wawancara melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan 14 informan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan mengambil beragam posisi sebagai audiens dalam pengalaman mereka. Pada posisi <i>dominan readers</i> mereka menganggap polarisasi politik yang terjadi merupakan sebuah hal yang wajar dialami oleh negara demokrasi dan bukan suatu hal yang perlu ditakuti. Dilanjutkan oleh informan dalam posisi <i>negotiated readers</i> yang menganggap polarisasi politik merupakan sebuah hal yang boleh saja terjadi namun harus berhenti pada arti perbedaan pendapat serta dalam pengawasan jangan sampai berubah menjadi konflik dan perpecahan.</p>
Kata kunci: <i>Generasi Z;</i> <i>Pemilu 2024;</i> <i>Polarisasi Politik;</i> <i>Media Digital.</i>	

I. PENDAHULUAN

Sebuah perbedaan pendapat, pandangan, ideologi dalam suatu masyarakat, terhadap berbagai macam hal merupakan hal yang biasa

bagi masyarakat Indonesia sebagai negara yang multikultural. Namun pada kenyataannya perbedaan pandangan pada preferensi politik secara khusus mampu membawa kepada perpecahan

dan konflik yang berkepanjangan. Terutama pada hari-hari ini dimana memasuki tahun politik menjelang kontestasi demokrasi pemilu 2024 mendatang, para aktor politik dan partai mulai gencar melakukan kampanye dalam ranah offline maupun dunia digital. Dalam dunia digital terkhusus sudah banyak ditemui tayangan-tayangan yang memunculkan politisi dengan agenda politik masing-masing. Salah satu diantaranya yaitu Anies Baswedan yang banyak diperkirakan sebagian pihak akan berlaga dalam Pilpres 2024. Indonesia telah mengalami penurunan kualitas demokrasi pada tahun 2019 silam yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia pada aspek hak politik dan kebebasan sipil (Kadir, 2022). Hal ini didukung dengan catatan dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan skor demokrasi 6,48 masuk kedalam kategorisasi demokrasi cacat. Salah satu penyebab penurunan kualitas demokrasi tersebut adalah pada polarisasi politik yang terjadi sejak 2014 telah sampai pada derajat yang mengkhawatirkan dan mencapai puncaknya pada pemilihan presiden 2019 yang melibatkan pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Karim, 2019).

Polarisasi politik yang semakin membahayakan stabilitas dan kualitas demokrasi di negeri ini menurut berbagai pihak adalah suatu hal yang harus diredam. Namun pendapat dengan sudut pandang lain datang dari salah satu politisi yaitu Anies Rasyid Baswedan dalam tayangan yang diunggah oleh channel youtube Anies Baswedan. Tayangan berjudul "Polarisasi di 2024" ini memiliki durasi 6 menit 32 detik telah ditonton lebih dari 11 ribu kali. Pada tayangan tersebut Anies membahas mengenai isu perpecahan yang dituduhkan kepadanya. Polarisasi politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memang oleh sebagian pihak disandarkan kepada Anies Baswedan sebagai akibat dalam menunggangi politik identitas pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada tayangan tersebut bernada menormalisasikan polarisasi politik yang terjadi. Beberapa diantaranya seperti *"orang takut dengan polarisasi karena disamakan dengan perpecahan, padahal polarisasi merupakan perbedaan pendapat dan sebuah hal yang biasa dalam kompetisi"*, *"Konflik polarisasi politik itu tidak terjadi di kampung-kampung dan hanya terjadi secara virtual saja seperti grup wa atau sosial media. Pada kehidupan masyarakat mereka biasa-biasa saja, mereka bekerja dengan kegiatannya"*. Pernyataan tersebut tentu menjadi

sebuah antitesis dari sebuah temuan dalam Rif'an (2018) bahwa polarisasi politik yang terjadi di dunia *offline* telah menimbulkan konflik dalam bentuk bentrokan fisik. Contohnya, terdapat insiden bentrokan fisik antara pendukung Prabowo yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden dan pendukung Jokowi yang mengenakan kaos #DiaSibukKerja pada saat kegiatan Car Free Day di Jakarta (Annas et al., 2019).

Dalam ranah digital, terlihat adanya polarisasi politik pada masyarakat dari pandangan umum yang dibagikan di media sosial yang semakin terpecah-belah. Hal ini berdampak pada munculnya perbedaan pandangan yang tajam serta memicu perilaku politik dan pecahnya hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat (Annas et al., 2019). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksepakatan pada isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, dan perubahan sosial. Iklim polarisasi politik cenderung bergejolak pada tingkat massa dibanding dalam tingkat elit politik yang menjadi sebab dari tingginya loyalitas terhadap kecenderungan persamaan preferensi politik, ideologi, dan identitas. Salah satu contohnya yaitu ditemuinya grup Facebook dengan nama #2019GantiPresiden dan juga #2019TetapJokowi. Grup #2019GantiPresiden sebagai grup diskusi online yang mendukung pergantian presiden petahana dengan presiden baru pada 2019, sedangkan grup #2019TetapJokowi adalah grup diskusi online yang menginginkan presiden petahana tetap menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa opini anggota grup #2019GantiPresiden yang ditujukan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf cenderung bermuatan negatif. Narasi-narasi yang disampaikan tidak jauh dari pendapat bahwa Jokowi tidak jelas asal-usul keluarganya, tidak jelas keagamaannya (Annas et al., 2019).

Begitupun sebaliknya jika dilihat dari anggota grup #2019TetapJokowi memiliki opini bermuatan negatif terhadap pasangan Prabowo-Sandi dalam aspek agama dan kebijakan. Salah seorang dari anggota grup #2019TetapJokowi tersebut menyatakan bahwa janji yang dikemukakan Prabowo adalah suatu hal yang tidak realistis dan bersifat utopis atau sebagai *sales* semata. Aspek kepribadian Prabowo seperti sifat dan watak turut menjadi bahan kritikan berdasar rekam medis dengan sebutan Prabowo yang temperamental. Prabowo yang merupakan seorang mualaf juga menjadi opini kritik anggota

grup #2019TetapJokowi yang mempersoalkan bahwa Prabowo merupakan keturunan non-Muslim. Opini-opini yang disampaikan pada kedua grup faktanya belum bisa dipastikan validitasnya karena tidak didukung dengan data ilmiah.

Polarisasi yang terjadi pada tahun 2014 yang melibatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berpotensi pada terjadinya perpecahan yang termanifestasi dalam segregasi dan politik pelabelan yang terjadi (Masykuri & Ramadlan, 2021). Seperti adanya ujaran kebencian pada label-label tertentu dengan mencitrakan kelompok sendiri dengan label yang positif ("bendera tauhid" atau "partai Allah") sedangkan untuk kelompok lain dicitrakan negatif ("partai setan", "muslim muniafik" atau "kadal gurun"). Label "Partai Allah vs Partai Setan", berperan sebagai klaim dan legitimasi yang hendak diciptakan bahwa kelompok pendukung Prabowo adalah kelompok yang memperjuangkan aspirasi Islam, sedangkan kelompok Jokowi dianggap bertentangan dengan Islam. Upaya ini adalah tujuan dari politik pelabelan, yakni mempertegas kategorisasi dan perbedaan antar kelompok.

Hingga kemudian semakin terlihat nyata dalam konflik politik seputar Pilkada DKI pada tahun 2016 dan 2017. Seperti yang diungkapkan oleh (Mietzner, 2018) konflik tersebut sangat mirip dengan situasi politik yang terjadi di level nasional. Konflik tersebut melibatkan dua kelompok besar, yakni mereka yang mendukung Jokowi dan Ahok di satu sisi dan mereka yang menentang Jokowi dan Ahok di sisi yang lain (Osman & Waikar, 2018). Polarisasi juga muncul akibat perbedaan dalam partai politik dan ideologi, terlebih apabila kontestasi hanya diikuti oleh dua pasangan calon maka polarisasi antar kelompok akan menguat. Para aktivis partai politik memahami pola tersebut serta percaya bahwa pemilih lebih menyukai untuk memberikan hak pilihnya kepada kandidat atau pasangan calon yang memiliki latar belakang etnis yang sama dengan mereka, terutama ketika kelompok mereka mewakili mayoritas penduduk di wilayah yang bersangkutan (Aspinall et al., 2011), dapat dilihat ketika dilangsungkannya pemilihan presiden pada tahun 2014 dan kembali menggema dalam pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 (Hadiz, 2018); (Lim, 2017); (Mietzner, 2018).

Selain menurunnya kualitas demokrasi dan hak kebebasan sipil, dampak dari adanya polarisasi adalah membuat salah satu kelompok

mempunyai pandangan bahwa pemikirannya yang lebih benar ketimbang kelompok yang lain karena alasan pandangan politik bersama dengan moralitasnya. Sejalan dengan hal tersebut polarisasi menghadirkan sebuah pergeseran pembingkai komunikasi politik suatu identitas (Aminullah, 2022). Pada sisi lain jejak polarisasi juga tidak bisa menghilang begitu saja dari kontestasi politik sebelum-sebelumnya yang masih menyimpan jejak politik dimana berpotensi akan terus berpengaruh terhadap kontestasi politik yang akan datang (Karim, 2021). Memasuki tahun-tahun politik suhu panas laga demokrasi dari berbagai pihak mulai terasa dalam berbagai medium. Berangkat dari hal tersebut maka menjadi penting untuk dilakukan kajian menilik potensi polarisasi yang akan terjadi terkhusus dalam media digital mengenai peran generasi Z atau angkatan muda dalam menanggapi isu polarisasi politik. Generasi Z sebagai *digital native* dengan jumlah presentase pengguna internet sebesar 97,7% berdasarkan data dari Alvara research Center dari total 212,9 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 menurut We Are Social.

Generasi Z merupakan kaum muda yang termasuk kedalam pengguna internet terbesar dan tertinggi dengan usia rata-rata berkisar antara 18-24 tahun. Golongan muda dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun merupakan kelompok generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1995-2010 (Rakhman & Haryadi, 2019). Pada tahun 2018, David Stillman dan Jonah Stillman mengidentifikasi setidaknya tujuh ciri khas Generasi Z dalam penelitian mereka. Ciri-ciri tersebut adalah *Figital*, *Hiper-Kostumisasi*, *Realistis*, *Fear of Missing Out*, *Weconomist*, *Do it Yourself*, dan *terpacu*. Sebagai generasi yang praktis, mereka cenderung tidak takut pada perubahan karena mereka yakin bahwa teknologi dapat menyelesaikan semua hal (Annamaria, 2011).

Generasi Z menggunakan media digital sebagai sumber utama dalam mengakses informasi isu-isu sosial tak terkecuali politik. Keterlibatan generasi Z pada demokrasi dan politik di Indonesia menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak terutama politisi Indonesia yang akan berlaga pada pemilu 2024 mendatang. Fakta menunjukkan data dari *bijakmemilih.id* bahwa 55% atau sekitar 107 juta *voters* 2024 adalah angkatan muda dan generasi Z termasuk kedalam angka tersebut. Menurut Johnson & Johnson (2010), generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 1995 dan

disebut sebagai *linkster generations*, yaitu generasi yang terhubung dengan teknologi internet sejak pertama mereka lahir. Dengan demikian, tingginya angka aktivitas generasi Z dalam menggunakan internet tentu diperlukan kemampuan literasi dan penggunaan media dengan bijak dalam setiap individu. Salah satunya adalah dalam menerima, menanggapi, atau bahkan mengelola isu-isu sosial yang sedang terjadi di internet atau media sosial (Rakhman & Haryadi, 2019). Generasi Z di Indonesia telah menunjukkan partisipasi politik yang aktif melalui media digital dan aksi turun ke jalan.

Sebagai contoh, pada 2019, tagar #ReformasiDiKorupsi menjadi viral di Twitter sebagai gerakan mahasiswa terbesar setelah Reformasi 1998, sebagai aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan pembatalan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi ini dilangsungkan di berbagai kota besar di Indonesia oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Partisipasi politik Generasi Z seperti ini memiliki peran penting dalam menunjukkan kepedulian terhadap negara, terutama karena sebanyak 55% atau 107 juta voters pemilu 2024 adalah pemuda dan sebagai mayoritas pemilih mereka berperan penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Dalam pilpres 2019 contohnya, pemilih yang berada pada kelompok Generasi Z ternyata cenderung diperebutkan oleh kedua pasangan calon. Hal ini dilandasi dengan fakta bahwa penggabungan antara kelompok pemilih milenial dan Generasi Z (pemuda) dari segi jumlah mendominasi keseluruhan calon pemilih terdaftar (Ichlas et al., 2020a).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelompok angkatan muda mencapai 37,7% dimana ditambahkan dengan 12,7%-nya termasuk ke dalam kategori pemilih pemula dan diperkirakan akan mengalami kenaikan tren menjelang Pemilu 2024. Kegandrungan generasi Z akan media digital menyisakan persoalan terkait daya saing dan partisipasinya dalam pembangunan demokrasi. Dari satu sudut, populasi generasi Z berpotensi menghasilkan generasi yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi pada kemajuan demokrasi. Namun, di sisi lain, generasi ini dapat menimbulkan masalah kependudukan, sehingga penting untuk memberikan fokus dan perhatian yang besar pada kebijakan pembangunan strategis untuk memajukan demokrasi nasional (Lubis & Mulianingsih, 2019).

Diskursus lain seperti bonus demografi yang sedang berlangsung di Indonesia tentunya juga menjadi sebuah peluang yang tidak mungkin diabaikan begitu saja bagi aktivis politik untuk memenangkan suara pemilih kelompok angkatan muda. Pada fase digital ini secara khusus pengaruh yang diakibatkan dalam kehidupan masyarakat dalam konteks komunikasi politik faktanya telah melampaui apa yang telah dicapai pada fase-fase sebelumnya (Ichlas et al., 2020a). Tanpa disadari, perkembangan teknologi digital khususnya media baru dan media sosial mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Jika dulu partisipasi politik dilakukan secara tradisional, namun sekarang partisipasi politik juga dapat dilakukan di media baru bahkan media sosial (Halim et al., 2020). Jika dalam media konvensional masyarakat mengalami kesulitan untuk menyampaikan opini dan pemikirannya secara leluasa, bersama hadirnya media sosial sebagai media baru setiap orang mulai bergeser menjadi *prosume* yaitu yang tadinya hanya sebatas konsumen menjadi produsen informasi dalam waktu yang bersamaan Bell (2007) dalam (Ichlas et al., 2020b). Internet dan media baru sangat diperlukan untuk menjaga komunikasi politik di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena ia memungkinkan terkoneksi politisi, pendukung partai politik, aktivis, dan partai-partai itu sendiri.

Memasuki rangkaian menuju pemilu 2024 aktor-aktor politik yang digadang-gadang akan berlaga dalam kontestasi demokrasi akan melaksanakan kampanye-nya dalam waktu dekat. Proses panjang menuju pesta demokrasi 2024 sudah dimulai dan Generasi Z yang juga termasuk kedalam pemilih pemula dalam pemilu 2024 mendatang diharapkan mampu menghadapi isu polarisasi politik yang berpotensi akan terjadi dengan bijak apabila ditemukan praktik politik identitas, kampanye hitam, politik transaksional, serta pemanfaatan media digital dalam proses pemilu. Pembahasan mengenai polarisasi politik dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik menjadi sebuah isu yang menarik namun juga ini kurang mendapat perhatian yang memadai dalam kajian komunikasi politik Indonesia.

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul ketika generasi Z yang menggunakan media digital terpapar konten isu polarisasi politik, memunculkan pertanyaan apakah generasi Z memahami tujuan narasi dan juga pemikiran politisi dalam menyampaikan pesan-pesannya? Menurut teori *reception analysis* yang

dikemukakan oleh Stuart Hall, diasumsikan bahwa makna pesan dari isi yang dihasilkan oleh media bergantung pada bagaimana khalayak mengkonstruksi isi pesan tersebut, sehingga makna yang disampaikan oleh media tidak serta merta sama dengan penafsiran khalayak. Peneliti meyakini bahwa penelitian ini penting karena generasi Z saat ini merupakan pemegang estafet kepemimpinan demokrasi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti mencoba menjawab rumusan masalah bagaimana generasi Z di kota Surabaya menerima isu polarisasi politik menjelang kontestasi pemilu 2024 yang ditampilkan dalam media digital.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis khayalak media atau pendekatan kajian resepsi (*reception studies*). Penelitian resepsi bertujuan untuk mengamati dan memahami tanggapan, penerimaan, sikap, dan interpretasi yang terbentuk oleh penonton terhadap sebuah karya sehingga menghasilkan pemaknaan yang berbeda terhadap pesan yang ditawarkan oleh media (Tutiasri, 2021). Peneliti mencoba mengungkapkan bagaimana Generasi Z di Surabaya menerima isu polarisasi politik di dalam ruang diskusi media digital. Tahap pertama peneliti melakukan filtrasi pada beberapa generasi Z di Kota Surabaya yang memiliki ketertarikan menjelang kontestasi pemilu 2024 dan isu polarisasi politik di Indonesia. Tahap selanjutnya dalam penarikan hasil penelitian dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan masing-masing tujuh informan dalam 2 kelompok. Mengenai kriteria informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu generasi Z rentang usia 18-25 tahun di Kota Surabaya yang aktif menggunakan internet dan media digital.

FGD dilakukan untuk dapat mengetahui pemahaman, legitimasi, dan interpretasi generasi Z di Surabaya terhadap isu polarisasi politik yang terdapat pada tayangan "Polarisasi di 2024" dalam channel youtube Anies Baswedan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Polarisasi Politik Niscaya Terjadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) polarisasi memiliki makna pembagian atas dua bagian kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya yang berlawanan. Dalam makna lain polarisasi politik merupakan dua kelompok yang mempunyai paham dan juga pandangan yang berbeda dalam

kaitannya dengan politik (Aminnullah, 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya terminologi polarisasi apabila diartikan sebagai perbedaan pandangan atau pendapat maka menjadi sebuah hal yang niscaya, nyata adanya, dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersosial. Bahkan polarisasi politik merupakan hal yang harus terjadi dalam sebuah negara karena apabila tidak ada perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap calon pemimpin maka esensi dari diadakannya pemilihan umum itu sendiri akan hilang. Hal ini didasari karena setiap individu berhak menentukan pilihan mana yang benar, baik, dan buruk menurut diri masing-masing. Terkhusus dalam aspek politik baik dalam skala politik yang besar maupun kecil pasti akan ditemui perbedaan pandangan terhadap sebuah pilihan. Dalam semua negara demokrasi polarisasi politik akan terjadi. Narasi menarik yang disampaikan dalam tayangan tersebut adalah bagaimana ada atau tidak adanya Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang maka polarisasi akan tetap terjadi. Sebagian informan beranggapan bahwa polarisasi politik yang melibatkan peperangan antar kubu pendukung satu dan yang lain boleh-boleh saja dan memang wajar terjadi dalam konteks perbedaan pendapat asalkan tidak menjadi fanatisme, melewati ambang batas, dan dibesar-besarkan sehingga bisa menyebabkan konflik dan perpecahan. Terlebih lagi apabila polarisasi politik yang terjadi ditunggangi politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Salah satu penyebab mengapa polarisasi politik di negeri ini menjadi suatu hal yang berbahaya disebabkan oleh argumen-argumen dan opini yang dikeluarkan oleh para pendukung pasangan calon bersifat menyerang aspek-aspek personal. Alih-alih mengkritisi program-program yang dicananakan oleh partai dan politisi, para pendukung pasangan calon justru berfokus pada aspek non-substansial seperti latar belakang agama, suku, ras, dan yang lainnya. Diperlukan sikap yang bijak dan matang dalam menanggapi polarisasi politik sendiri, tidak hanya menganggap dari satu sudut pandang yaitu perpecahan atau konflik. Menurut salah satu informan dalam FGD hal yang seharusnya menjadi fokus atau PR bersama dan menjadi dampak dari adanya polarisasi yaitu bagaimana menetralkan kembali iklim panas

perbedaan pendapat dan juga menyatukan masyarakat setelah peperangan politik selesai. Selain hal tersebut bagaimana cara mengubah sudut pandang masyarakat terhadap polarisasi politik yang lebih sehat dan hanya memandang polarisasi sampai pada batas perbedaan pendapat bukan perpecahan masyarakat. Penyatuan dari dua kubu yang terbelah ini adalah upaya agar tidak berlanjutnya polarisasi hingga pada masa pasca kampanye bahkan masih berlanjut hingga Pemilu di masa depan.

2. Politik Identitas Sebab Polarisasi Politik

Pilkada DKI 2017 menyisakan begitu banyak bekas polarisasi politik yang dalam bagi sebagian pihak. Para partai politik dan pasangan calon yang bertanding pada pemilihan umum masih membangun narasi yang berdasarkan identitas politik, seperti suku dan agama. Selain itu, polarisasi juga bisa terbentuk karena adanya penyebaran informasi melalui media sosial yang berisi berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, dan kampanye hitam. Kesamaan agama, ras, dan golongan dalam politik menjadi jalan pintas bagi sebagian politisi dalam mendapatkan dukungan secara meluas. Fakta ini termanifestasi dalam politik pelabelan yang kian melanggengkan polarisasi hingga pada pemilu-pemilu berikutnya. Label "cebong" dan "kadrun" contohnya yang bahkan sampai pada hari ini masih terdengar gemanya baik dalam ranah digital maupun nyata. Hal ini tentunya berdampak pada stabilitas nasional ketika dalam penolakan kebijakan rezim yang disampaikan secara tidak baik dan cenderung bernada kebencian yang tidak bisa dipungkiri hal tersebut datang dan dilatarbelakangi karena kekalahan pihak yang didukung pada kontestasi yang bahkan sudah beberapa tahun berlalu.

Aspinall (2011) menyatakan kontestasi politik atau politik elektoral yang telah terjadi meninggalkan penanda-penanda, dan sangat mudah untuk menemukan tanda tersebut. Tanda-tanda simbolik beroperasi tidak hanya di antara kelompok sosial yang sangat berbeda, tetapi juga dapat diamati di dalam kelompok sosial yang sama, dalam hal ini kelompok politik Islam (Aspinall et al., 2011) yang terutama ditemui sejak dilangsungkannya pemilihan presiden pada tahun 2014 dan menggaung kembali pada pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017. Pada pemilu terakhir

yaitu tahun 2019 memiliki banyak sekali fenomena politik yang membuat masyarakat Indonesia terpolarisasi (Annas et al., 2019).

Polarisasi yang jelas sudah terlihat sejak Pilpres 2014 berlanjut selama tahap pemilihan dan setelahnya, terutama melalui media sosial. Peta potensi polarisasi dapat terlihat jelas dari latar belakang masing-masing kandidat dalam Pilpres 2014 sebagai aktor-aktor yang berseberangan dalam segala hal menurut (Stevano & Sumampouw, 2018). Pendukung kedua pasangan dengan cepat terbagi menjadi kubu yang berlawanan, terutama karena tema yang diusung oleh kedua pasangan sangat berseberangan. Satu pasangan membahas tentang memperkuat kawasan pinggiran di Indonesia, sedangkan pasangan lain membahas tentang mengembalikan kejayaan Indonesia. Pasangan satu menargetkan kelompok nasionalis, sedangkan pasangan lain menargetkan kelompok Islam. Seiring berjalannya waktu, polarisasi semakin jelas terbentuk dan pemilih tidak ragu dalam menunjukkan keberpihakannya di ruang publik dan media sosial (Gaffar Karim, 2019). Polarisasi politik yang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan politik yang ingin mencapai tujuan secara cepat dan singkat. Polarisasi politik ini kemudian diubah menjadi strategi segmentasi politik yang merefleksikan kebutuhan elit dalam membangun citra politik secara cepat melalui penggunaan simbol-simbol elektoral yang berbasis pada identitas seperti kelompok, agama, daerah, dan sejenisnya. Perlu disadari bahwa pembelahan politik yang ekstrem seperti polarisasi antara "kadrun" dan "togog" atau perbedaan politik antara "orang kita" dan "musuh politik" merupakan jebakan politik yang hanya menguntungkan elite politik dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya dalam jangka pendek. Namun, secara esensial, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi warga negara.

3. Partisipasi Generasi Z dalam Polarisasi Politik

Partisipasi generasi Z dalam aspek pembangunan nasional dan demokrasi menjadi sebuah hal yang patut diperhitungkan. Melihat potensi bonus demografi dibarengi dengan majunya teknologi informasi, generasi Z yang salah satunya sifatnya yaitu *Weconomist* atau ekonomi berbagi dalam artian lain yaitu Gen Z

merupakan salah satu generasi yang cukup perhatian dengan isu sosial yang terjadi seperti kepedulian pada perubahan iklim, transisi energi, pendidikan, hingga politik dan demokrasi. Menurut pandangan informan dengan nada optimis mengungkapkan bahwa Gen Z mampu meredam polarisasi politik yang terjadi menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini didasari oleh kemampuan literasi digital yang dimiliki Gen Z sebagai *digital native* dalam media digital atau sosial media. Dalam hal adaptasi dan penggunaan teknologi informasi yang terus berkembang, Gen Z satu langkah lebih maju daripada generasi sebelumnya.

Oleh karena itu Gen Z mampu memahami karakteristik basis setiap pengguna maupun sifat platform media digital seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Youtube, yang satu dan lainnya berbeda-beda yang memungkinkan adanya *double crosscheck* atau *factcheck* atas sebuah isu yang sedang didiskusikan. Sehingga aspek-aspek yang bersifat pribadi seperti latar belakang kandidat politisi lebih bisa dinomorduakan dalam diskusi serta berfokus pada rekam jejak dan program-program yang dicanangkan oleh politisi dan partai. Gen Z dalam informan penelitian ini berargumen bahwa polarisasi politik harus diartikan sebatas pada perbedaan pendapat dan pilihan saja dan tidak mengarah kepada perpecahan, sehingga tidak membuat pengaruh buruk di media sosial. Asumsi dasar inilah yang kemudian diharapkan mampu membawa alur positif polarisasi politik sehingga kembali kepada diskusi dan juga perdebatan yang sehat serta produktif.

Pada pandangan lain dengan nada kurang optimis informan mengatakan bahwa potensi Gen Z dalam dunia digital dan polarisasi politik cenderung agak menyisakan sisi bahaya yang harus diantisipasi. Fenomena *cancel culture* yang menyerang pribadi seseorang yang banyak dilakukan Gen Z menjadi ketakutan yang Gen Z sendiri sudah sadar akan potensi keterlibatannya dalam memperkeruh polarisasi yang terjadi. Unsur obojektifitas yang dimiliki Gen Z menjadi harapan tersendiri dalam Pemilu 2024 mendatang agar menjadi sadar bahwa setiap individu memiliki pilihannya masing-masing, dan berusaha agar tidak menyerang atau membuat perpecahan dengan pendapat yang berseberangan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Meninjau hasil dari penelitian ini dapat diamati bahwa Generasi Z telah sadar akan adanya potensi polarisasi politik menjelang Pemilu 2024 mendatang baik dalam dunia digital maupun dunia nyata. Generasi Z berpendapat bahwa polarisasi politik itu sebuah hal yang niscaya terjadi dalam setiap negara demokrasi yang akan melaksanakan pemilihan pemimpin. Mereka menganggap bahwa polarisasi politik bukan merupakan suatu hal yang buruk. Namun mereka juga sadar akan dampak negatif dari polarisasi politik yang terjadi dengan melihat jejak-jejak polarisasi pada Pilkada DKI 2017 hingga pemilu 2019 yang masih membekas hingga saat ini.

Melihat potensi bonus demografi dan sebagai *digital native* Generasi Z cenderung optimis mampu menanggapi dengan bijak atas polarisasi politik yang akan terjadi. Polarisasi politik diharapkan hanya dilihat sebagai perbedaan pandangan yang sehat serta tidak dianggap sebagai perpecahan. Hal ini disebabkan beberapa dampak positif dari adanya polarisasi yaitu semakin terlibat aktifnya masyarakat terkhusus gen Z dalam menilik isu-isu politik, janji kampanye politisi, hingga kebijakan yang akan dibuat. Dalam kajian penerimaan khalayak (*reception studies*) audiens atau khalayak merupakan penerima aktif dan tidak homogen. Latar belakang pendidikan, preferensi, dan juga pengalaman setiap individu yang berbeda menghasilkan penerimaan pada tiga posisi dalam menerima pesan teks media.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan audiens Generasi Z dalam menerima polarisasi politik terbagi dalam tiga posisi khalayak. Mereka pada posisi *dominant-readers* adalah mereka yang menerima sepenuhnya polarisasi politik yang terjadi pada negara demokrasi. Ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan maka secara otomatis masing-masing akan memiliki pendapat dan pilihan apa yang menurut mereka benar, terbaik, dan patut untuk dipilih. Terlebih lagi dalam sebuah negara demokrasi yang akan melaksanakan pemilihan umum maka menjadi sebuah keadaan dimana polarisasi politik niscaya muncul serta sudah menjadi hal yang wajar dan biasa. Justru menjadi sebuah hal yang janggal apabila tidak ada polarisasi politik yang terjadi dalam sebuah pemilihan

umum dan seluruh masyarakat memiliki pendapat yang sama. Kelompok yang berada pada posisi *negotiated readers* tidak menerima sepenuhnya polarisasi politik yang terjadi namun mereka menyatakan bahwa polarisasi politik yang terjadi di Indonesia memang boleh saja terjadi sehingga menciptakan suasana politik aktif dari masyarakat sipil yang menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan demokrasi asalkan tidak berlebihan.

Sehingga disisi lain tetap menjadi suatu hal yang harus ditinjau ulang mengingat karakteristik masyarakat dengan loyalitas tinggi. Masyarakat perlu mengubah sudut pandang mereka terhadap polarisasi politik sehingga terbatas pada artian perbedaan pendapat bukan merupakan sebuah perpecahan. Seperti munculnya pemikiran bahwa jika berada dalam suatu pihak dan menjadi pendukung maka tidak boleh menjelek-jelekan serta mengganggu keberpihakan orang lain terhadap pendukungnya. Jika hal ini dapat terwujud maka persaingan yang sehat antara politisi, partai, dan masyarakat sipil dalam sebuah kontestasi demokrasi akan berjalan dengan baik. Adanya Gen Z sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 berbekal kemampuan literasi digital yang cukup baik akan mampu menanggapi polarisasi politik dengan bijak.

Khalayak dalam posisi *oppositional readers* menolak sepenuhnya atas polarisasi politik yang terjadi. Ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam menanggapi polarisasi politik disebabkan sifat pendukung yang memiliki fanatisme tinggi terhadap pihak yang didukung. Sehingga seperti yang telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya yang berakibat tajamnya polarisasi yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan kembali dalam masyarakat. Faktor lain dari kalangan elit politik yang mengambil keuntungan dari adanya polarisasi politik yang melihat pecahnya stabilitas nasional mereka dianggap mendapatkan keuntungan dan justru menjadikan politik identitas sebagai tanggungannya yang semakin memperkeruh keadaan. Terlebih dalam era digital yang serba mudah dan cepat, perkembangan informasi palsu, berita bohong, *buzzer*, dan semacamnya turut mengobarkan api perpecahan dan konflik antara dua kubu. Terlebih pada sifat polarisasi politik yang tidak bisa hilang begitu saja cenderung erat berkaitan dengan persaingan

masa lalu dan akan tetap berpengaruh pada persaingan masa depan, maka polarisasi politik merupakan sebuah kemunduran demokrasi yang buruk bagi sebuah negara. Pilkada DKI 2017 hingga Pemilu 2019 sudah cukup menjadi kolam perpecahan bagi bangsa Indonesia serta tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas perpecahan tersebut.

B. Saran

Terkait saran peneliti terhadap generasi Z dalam menanggapi polarisasi politik yang terjadi yaitu dengan tetap awas terhadap seluruh proses kampanye politisi dan mampu menangani isu polarisasi baik khususnya yang terjadi dalam media digital agar turut meredam dan tidak menjadi konflik atau perpecahan. Sebagai tindakan preventif yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan literasi digital dalam bermedia sosial, memahami proses-proses pemilihan umum, serta melek terhadap penyelewengan kampanye seperti praktik politik identitas, politik uang, dan kampanye gelap. Disisi lain bagi politisi dna elit partai hendaknya menggunakan cara-cara sehat dalam mendapat dukungan dan suara rakyat. Penggunaan politik identitas dan kampanye gelap hanya akan memecah belah bangsa yang secara dampak tidak akan ada pihak yang mau bertanggung jawab meski pesta demokrasi telah berakhir. Adapun saran dalam agenda riset yang akan datang peneliti memberikan saran penelitian bagaimana media digital mengontrol isu polarisasi politik pasca masa kampanye 2024.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminnullah, M. F. (2022). Polarisasi Politik: Pro Kontra Warga Mengenai Isu Rekrutmen TNI Dari Keturunan PKI. *Journal of Citizenship*, 1(2).
- Anggraini, M., & Febriyanti, S. N. (2023). Iklan Digital: Pornomedia dan Konten Seksualitas. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2336-2345.
- Annamaria, T. (2011). Z Generation: Clinical Psychological Phenomena and Socio-Psychological Aspect in The Information Age. Budapest: Tericum.
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial. *Jurnal PIKOM*

- (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan), 20(2), 111-122.
- Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). When religion trumps ethnicity: a regional election case study from Indonesia. *South East Asia Research*, 19(1), 27-58.
- El Qudsi, M. I., & Syamtar, I. A. (2020). Instagram dan Komunikasi Politik Generasi Z dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi pada Mahasiswa Universitas Pertamina). *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4(2), 167-185.
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566-583
- Johnson, M., & Johnson, L. (2010). *Generations, inc: From boomers to linksters-managing the friction between generations at work*. New York, NY: AMACOM.
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(0), 2.
- Lim, M. (2017). *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*. 49(3), 27-411.
- Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis Manifestasi Segregasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 68-87.
- Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282.
- Osman, M. N. M., & Waikar, P. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement. *Indonesia*, (106), 89-109.
- Purnamasari, N. P., & Tutiasri, R. P. (2021). Analisis resepsi remaja perempuan terhadap gaya hidup berbelanja fashion melalui tayangan video 'Belanja Gak Aturan'dalam akun Tiktok@handmadeshoesby. *Jurnal Representamen*, 7(01).
- Rakhman, M. A. PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z.
- Sumampouw, N. S. A. (2018). The money that never sleeps: Bureaucratic movement and vote buying dynamics in Bolaang Mongondow, North Sulawesi. *PCD Journal*, 6(1), 31-60.
- Tutiasri, R. P., Yuliani, E. R., Purnamasari, N. P., & Putri, C. O. (2020). Analisis Resepsi Budaya Menjenguk Orang Sakit Dalam Film Pendek Tilik Pada Ibu-Ibu Di Kabupaten Bantul. *voxpath*, 2(1), 100-115.
- Yolanda, H. P., & Halim, U. (2020). Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 10(2), 30-39.